

DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK: MENGKRITISI WACANA POLITIS

Untara Simon

UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA

kristokinoe@gmail.com

Abstrak

Perkembangan wacana politik di Indonesia terutama menjelang pilpres 2019 sering kali diwarnai oleh drama-drama politik yang tidak jarang mengisahkan tentang perang berita palsu atau *hoax* oleh para pendukung paslon. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia sangat jauh dari upaya menjunjung nilai kebenaran. Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif bidang filsafat berusaha mengkaji permasalahan tersebut dengan meninjau sejauh mana kebijakan publik di Indonesia bisa mendorong demokrasi yang sehat. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) *Hoax* atau *fake news* adalah salah satu dampak negatif dari arus besar perkembangan media komunikasi massa, (2) *Hoax* dalam dunia politik mengakibatkan perkembangan wacana politik yang tidak sehat dan seringkali menimbulkan pertarungan wacana yang tidak jarang berdampak pada munculnya konflik di masyarakat, (3) Perlu terdapat peran serta negara dalam upaya merawat identitas kebangsaan serta komunitas kritis dalam pendidikan tentang literasi media massa soal kesadaran bahwa media komunikasi massa dapat melakukan framing, propaganda terhadap para konsumennya.

Kata Kunci: Demokrasi, Hoax, Wacana Politik

Pendahuluan

Di tengah riuhnya perhatian masyarakat Indonesia oleh kisah-kisah memprihatinkan karena gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Lombok dan Palu-Donggala, Kehidupan politik Indonesia diselipi oleh kisah menarik tentang Ratna Sarumpaet. Ratna Sarumpaet yang merupakan anggota tim sukses Prabowo-Sandi, salah satu kontestan pilpres 2019 menyampaikan kabar bahwa ia dipukuli orang. Dalam waktu singkat, kawan-kawannya sesama anggota tim sukses dan bahkan Prabowo sendiri bereaksi dengan menyebut bahwa tindakan ini mencederai demokrasi yang sehat dan dengan demikian, peristiwa ini harus dibaca sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga warga negara dan menjaga keberadaban demokrasi. Dalam kegemparan itu, Polisi menemukan beberapa kejanggalan serius sampai akhirnya menemukan bahwa sebab wajah lebam itu bukan karen dipukuli tapi karena operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan yang dikunjungi oleh Ratna Sarumpaet beberapa hari sebelumnya.

Akhirnya, Ratna Sarumpaet sendiri yang mengakui bahwa ia membuat berita bohong tentang kondisinya. Karena penyebaran berita bohong itu, polisi menahan Ratna saat ia hendak bepergian ke Chile dalam rangka menghadiri salah satu konferensi. Ia dicurigai berpotensi melarikan diri dari hukum.

Sebagai sebuah narasi politik, kisah Ratna Sarumpaet ini menarik karena ia berhasil menyedot perhatian banyak pihak bahkan dari yang awalnya sangat prihatin dan berduka karena tsunami Palu dan Donggala menjadi fokus memperhatikan kisah di Jakarta. Dalam kasus ini, beberapa orang dengan kemampuan dan pengalaman politik yang sangat mumpuni bahkan ikut terlibat dan dengan demikian mereka “tertipu” oleh kabar bohong. Bahkan, ada juga politisi yang menggunakan keahliannya dalam bidang sains ilmiah juga terlibat mendukung kisah bohong ini sehingga apa yang bohong ini menjadi sedemikian meyakinkan terlepas orang tersebut tahu atau tidak tahu bahwa berita yang didukungnya adalah berita bohong. Dalam konteks politik praktis, kisah Ratna Sarumpaet dan tafsiran-tafsiran atasnya bukan sekedar berita bohong melainkan bagian dari proses permainan wacana untuk menguntungkan pihak tertentu. Bagi para politisi, penggorengan wacana ini penting untuk memoles citra politisi tertentu dan merusak citra politisi lawannya. Begitulah kondisi demokrasi kita yang penuh dengan perang citra.

Lebih dari itu, kisah di atas pada dasarnya mengajak saya berimajinasi. Bila saja, penyebaran berita bohong ini berhasil, barangkali kita tidak menyebutnya berita bohong pada hari-hari ini tapi sebuah kebenaran. Lalu, kita mungkin saja hari ini mengenang Ratna Sarumpaet juga bukan sebagai penyebar hoax terbaik sebagaimana dinyatakannya sendiri tapi sebagai aktivis yang jujur namun dianiaya oleh rezim yang berkuasa. Dalam hal ini, saya jadi berimajinasi lebih jauh agar gambaran saya menjadi lebih adil: bisa jadi banyak kisah heroik yang dipercaya telah dilakukan oleh orang-orang hebat pada masa lalu itu pada dasarnya penuh dengan kisah bohong belaka. Bedanya dengan kisah Ratna adalah bahwa kisah hebat yang bohong itu dipercaya banyak orang, disertai dengan bukti sah tak terbantahkan dan mampu meningkatkan pamor tokoh dalam kisah sementara dalam kisah Ratna, kebohongan itu tak terbukti, gagal meyakinkan banyak orang dan kemudian disebut sebagai hoax, bahkan ia sendiri mengakuinya. Bila demikian, yang membedakan hoax dan kebenaran bukan lagi kesesuaian

antara yang ada di pikiran dengan kenyataan yang riil terjadi (koherensi) melainkan melulu soal bagaimana suatu objek ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bisa dipercaya oleh publik sebagai kebenaran. Dengan kata lain, tidak lagi penting kenyataan dan kesesuaian antara pikiran dan kenyataan melainkan cukuplah kesesuaian itu diwakili oleh kaidah-kaidah logis (sekalipun tidak benar-benar terjadi secara riil) yang seringkali penuh retorika sehingga layak disebut masuk akal dan pantas dipercaya lalu diklaim sebagai “kebenaran”. Dalam kasus ratna, bahkan, yang juga penting adalah siapa yang mengklaim dan menafsirkan.

Dalam kondisi demikian, hanya mereka yang memenangkan “pertarungan” wacanalah yang membawa kebenaran. Dengan begitu, kebenaran tidak pernah lebih dari kemenangan wacana dari wacana lainnya. Inilah kurang lebih yang terjadi dalam era demokrasi kontemporer yang dipersenjatai oleh teknologi informasi digital. Tapi bagaimana demokrasi kita menjadi semakin penuh dengan “sampah kebenaran” semacam ini? Bagaimana wacana menjadi alat kontrol politis? Bagaimana sebaiknya menyikapi persoalan semacam ini? Tulisan ini akan berfokus pada diskursus tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Akar Demokrasi Kontemporer

Meski dalam banyak kajian politik, demokrasi sering disebut sebagai warisan pemikiran yang sudah dihidupi sejak 500 tahun sebelum Masehi (Masa Yunani Kuno), saya melihat bahwa demokrasi kontemporer pada dasarnya berakar pada masa Modern dan diperbaharui secara signifikan pada masa setelah perang dunia kedua. Gagasan para pemikir Modern memberi sumbangan sangat besar terutama dalam upayanya memformulasikan gagasan tentang manusia semacam apa yang akan berpartisipasi dalam hidup bersama. Bagi mereka, manusia dalam arti individu yang bebas dan setara adalah syarat hidup bersama yang masuk akal. Dalam pemikiran Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778), hidup bersama semacam ini menjadi mungkin bila dijalankan berdasarkan kontrak sosial (Hardiman, 2004). Kontrak sosial ini adalah kesepakatan antar individu yang berdaulat dan memperjuangkan tidak hanya kebaikan pribadinya melainkan juga kebaikan bersama. Terinspirasi gagasan para tokoh Modern inilah,

pandangan bahwa setiap orang memiliki derajat yang berbeda-beda karena keturunan, kebangsawanan, ras, agama ditolak dan semua individu memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai warga negara. Kesetaraan hak dan kewajiban ini diatur dalam kontrak sosial yang berciri rasional dan terwujud dalam konstitusi suatu negara bangsa konstitusional. Dalam perjalanan waktu, model hidup bersama yang paling memungkinkan terwujudnya aspirasi kebebasan dan kesetaraan adalah demokrasi.

Gagasan tentang negara konstitusional berdasar demokrasi yang dengan sedemikian rupa dijalankan oleh masyarakat Eropa pada dasarnya berbenturan dengan persoalan yang sangat serius ketika perang dunia kedua. Hidup bersama yang dijalankan berdasarkan kesetaraan dan kebebasan itu membawa mereka pada hidup bersama yang efektif dan efisien dalam mengejar tujuan bersama. Meski demikian, efektifitas dan efisiensi itu ternyata tidak hanya terjadi dalam upaya mengejar tujuan bersama sebagai bangsa namun bisa juga terjadi dalam upaya menghancurkan sebagian masyarakat demi hasrat kekuasaan. Masyarakat Jerman yang mayoritas kecewa dengan perjanjian Versailles sebagai buntut perang dunia pertama ternyata memilih afiliasi politik yang kemudian menjadikan partai Nasionalis Sosialis (Nazi) yang dipimpin oleh Hitler sebagai pemimpin politik nasional. Pilihan ini pada akhirnya justru menjadi ancaman serius bagi sebagian masyarakat Jerman, Eropa dan dunia. Ini tidak lepas dari rasisme dan hasrat ekspansif Hitler yang memimpin negara Jerman membantai Yahudi, hispanik dan banyak orang lain demi melampiaskan hasrat kekuasaannya atas nama kebaikan bersama bangsa Jerman. Mengingat banyaknya korban yang dilakukan dengan berbagai instrumen negara ini, para pemikir melihat bahwa persoalan totaliterisme yang terjadi pada masa Hitler sebagai persoalan konseptual. Di sini, gagasan Modern yang memuja universalitas dan kebenaran tunggal dikritik sebagai salah satu “pencipta” mentalitas totaliter, anti perbedaan. Sejak inilah, berbagai upaya perlawanan terhadap kemungkinan munculnya totaliterisme baru dimunculkan dalam berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang politik, khususnya untuk mengkritisi demokrasi.

Sekurang-kurangnya, saya melihat ada dua hal yang diperbarui dari model demokrasi pasca perang dunia kedua. *Pertama*, gagasan demokrasi pasca perang dunia kedua pada umumnya berusaha memformulasikan tata cara hidup bersama

yang menghindarkan diri dari kediktatoran/totaliterisme sebagaimana terjadi di beberapa negara penyulut perang dunia. Dalam hal ini, dikotomi ruang privat dan publik mendapatkan perhatian serius. Negara sebagai institusi publik tidak boleh menyentuh sisi privat seseorang selain menjamin kebebasan bagi tiap individu untuk mengelola sendiri ruang privatnya. Termasuk dalam hal ini memberi ruang seleluasa mungkin bagi perbedaan dan pluralitas. *Kedua*, pada umumnya, para pemikir demokrasi pasca perang dunia kedua mengarahkan pemikirannya pada upaya untuk memperkuat kontrol hidup bersama oleh setiap anggota masyarakat terhadap negara. Di sini, negara dijalankan secara partisipatif. Hal ini terjadi dengan dibukanya akses terhadap kebijakan yang menyangkut hidup bersama bagi setiap anggota masyarakat dan tiap warga negara sadar bahwa dia harus menjalankan kewajiban dan memperjuangkan hak-haknya. Pada dasarnya, meski andaian Modern tentang universalitas dikritisi, andaian individu yang berdaulat atas dirinya sendiri mendapat lahan yang semakin subur dalam demokrasi pasca perang dunia kedua.

Demokrasi pasca perang dunia kedua mengalami rekonstruksi pada era pasca 1970an. Setelah krisis ekonomi yang terjadi karena melonjaknya harga minyak dunia, gagasan ekonomi di negara-negara Eropa pasca perang dunia kedua dikritik oleh para Liberalis. Mereka melihat bahwa sistem ekonomi terkontrol oleh negara menyebabkan para pemodal memilih untuk menahan modalnya dan tidak berinvestasi (Steger, 2010: 9-10). Pada masa ini, mulailah era yang oleh para pemikir ekonomi disebut sebagai era neoliberalisme. Ini ditandai oleh investasi besar-besaran berbagai perusahaan transnasional di berbagai belahan dunia. Bersamaan dengan ini, tekanan terhadap setiap negara (khususnya negara berkembang/miskin) untuk mengubah sistem politiknya menjadi demokrasi menjadi sedemikian kuat. Beberapa pemikir melihat ini sebagai upaya negara kuat bukan hanya untuk memperluas investasi mereka melainkan juga melakukan berbagai hegemoni terhadap negara-negara miskin yang pada umumnya memiliki sumber daya alam yang sedemikian kaya (MacLeod, 2006: 139-162). Andaiannya, bila negara yang kaya akan sumber daya itu menjalankan sistem demokrasi pada pemerintahannya, perubahan politik akan menjadi hal yang niscaya pada periode tertentu. Dukungan pada kelompok yang menguntungkan para pemodal tertentu pada saat berkuasa akan melanggengkan cengkeraman

negara kuat, khususnya perusahaan transnasional yang berpusat di sana terhadap negara lain. Pada masa inilah, demokrasi disandingkan dengan globalisasi yang menampilkan wajah baru karena diboncengi oleh kapitalisme neoliberal dengan instrumen perusahaan transnasional. Sejak masa ini, demokrasi seringkali dianggap sebagai tawaran sistem politik negara kaya yang hanya menjadi dalih bagi pembentukan pasar bebas kapitalistik. Kondisi ini berjalan terus dengan melalui berbagai krisis dan semakin kuat, khususnya setelah Uni Soviet dan rezim Komunis, lambang perlawanan terhadap kapitalisme tumbang.

Dalam dekade terakhir, kapitalisme neoliberal menampakkan diri secara sangat masif dalam proses pergeseran menuju masyarakat industri 4.0. Secara sangat sederhana, era masyarakat Industri 4.0 ini ditandai oleh kemampuan setiap orang untuk berjejaring di dunia maya sebagai akibat dari globalisasi teknologi virtual. Berdasar data wearesocial.com yang melakukan pendataan terhadap pengguna internet seluruh dunia, sejak Januari 2018, pengguna internet seluruh dunia telah mencapai 4,021milyar dari total 7,6 milyar penduduk dunia (wearesocial.com diakses 5 November 2018). Sebanyak 5,1milyar penduduk dunia telah menggunakan *handphone* dan 3,1 milyar adalah pengguna media sosial. Dari jumlah penggunaannya, mayoritas pengguna menggunakan jejaring sosial facebook dan Youtube. Dalam hal ini, facebook diakses oleh mayoritas dari pengguna media sosial. Selain pertumbuhan ekonomi melalui kapitalismenya, pertumbuhan jejaring media sosial pada dasarnya telah memberi efek signifikan bagi perkembangan demokrasi karena dengan teknologi, partisipasi aktif warga negara terjembatani. Mulai dari jejaring sosial, perubahan sosial maupun krisis sosial bisa terjadi. Hal ini nampak misalnya dalam beberapa kasus pergerakan sosial yang terjadi dalam revolusi musim semi di negara-negara Arab dan Afrika Utara sekitar tahun 2011. Dalam Beberapa tahun terakhir, efek permainan jejaring sosial ini nampak pula dalam krisis kebocoran informasi digital

2. Pengetahuan sebagai Alat Kontrol

Dalam penelitiannya tentang penjara, Michel Foucault menemukan bahwa untuk mengubah perilaku narapidana, yang diperlukan bukan dengan paksaan penuh kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Para narapidana itu justru perlu diajak untuk merefleksikan kembali kejahatan yang telah dilakukannya.

Mereka diminta untuk membaca kisah-kisah tentang orang-orang baik, memahami perasaan yang dialami oleh korban kejahatan dan dalam beberapa kasus diminta untuk mendengar suara korban. Pada dasarnya, mereka diberi pengetahuan tentang apa yang dialami oleh korban kejahatannya sehingga ia bisa berempati dan menyesali apa yang dilakukannya. Pada beberapa kasus berat, untuk menjamin bahwa seseorang mengubah tindakannya, ia diberi pengetahuan pula bahwa seluruh tindakannya selalu berada di bawah pengawasan (panoptikon). Perasaan bahwa ia diawasi ini ternyata mengubah cara seseorang bertingkah laku tanpa perlu paksaan fisik. Hasil penelitian Foucault ini membawa pada kesimpulan bahwa upaya perubahan tingkah laku seseorang tidak perlu lagi menggunakan kekerasan melainkan dengan cara memberi pengetahuan sehingga penerima pengetahuan itu bertindak sesuai dengan pengetahuan yang “disuntikkan” padanya (Foucault, 1979: 138).

Meski pada mulanya meneliti penjara, Foucault melihat bahwa gagasan dasar yang diperolehnya ini tidak hanya berlaku pada narapidana. Ia melihat bahwa dalam hidup sehari-hari, perkembangan negara pada dasarnya menggunakan teknik-teknik injeksi pengetahuan. Agar warga negara tidak melakukan hal-hal yang abnormal, negara menyelenggarakan pendidikan yang wajib dialami oleh warga negara. Pendidikan ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk sekedar menjadikan warga negara pandai dalam hal-hal tertentu dan kemudian mereka mampu mencapai tujuan-tujuan pribadinya serta meningkatkan kualitas hidup bersama, namun ini adalah kontrol negara yang dilakukan agar warga negara menjadi “normal” dan bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Ruang-ruang lain juga dimunculkan oleh negara, bukan sekedar untuk menunjukkan bahwa negara sangat baik terhadap para warganya, melainkan agar masyarakat yang sesuai dengan tujuan negara tercapai. Pada gilirannya, masyarakat “normal” ini akan menjadikan negara mencapai tujuan-tujuannya. Dalam hal ini, tafsir tentang negara dapat diperluas menjadi berbagai institusi yang mengatur siapapun dengan memberikan pengetahuan tertentu agar setiap orang menjadi “normal” (Schroader, 2005: 257-277).

Demikianlah, hidup bersama menjadi “baik” tanpa perlu paksaan, kekerasan dan memberikan berbagai “teror” dan sensor. Inilah model kontrol/kekuasaan yang efektif dan efisien melalui pengetahuan. Di sinilah,

kesadaran tentang kontrol terhadap tindakan seseorang menemukan dimensi baru. Institusi tidak perlu menggunakan biaya yang sedemikian besar, cukup suntikan pengetahuan dan dengan pengetahuan itu, subjek penahu akan dengan sukarela bertindak sesuai dengan keinginan penguasa tapi mereka tetap merasa bebas. Demikianlah, semua mencapai keinginannya, semua merasa bebas, merasa senang. Semua normal.

3. Kontrol di era Kapitalisme Lanjut

Gagasan Foucault pada dasarnya adalah upayanya untuk membaca kondisi zaman di Eropa yang semakin hari semakin dijejali media komunikasi massa seiring dengan perkembangan mesin cetak, radio, televisi dan berbagai alat komunikasi pada masa itu yang diam-diam berfungsi sebagai propaganda. Lebih jauh, Jean Baudrillard menunjukkan bahwa masyarakat Eropa betul-betul menjadi masyarakat yang terkontrol dan patuh (normal) dengan tilikannya terhadap perkembangan kapitalisme lanjut (khususnya setelah 1970an) yang melanda Eropa. Sebagai seorang Marxis, Baudrillard melihat bahwa analisa terhadap kapitalisme penting dilakukan kapanpun, khususnya di masa ketika kapitalisme nampaknya memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan siapapun: pasca 1970an. Sedikit berbeda dari para pendahulunya yang memfokuskan penyelidikan pada soal produksi, Baudrillard menyelidiki konsumsi. Usul untuk menyelidiki tentang konsumsi ini pada dasarnya juga sudah digagas oleh Marx dengan mempertimbangkan bahwa produksi terus-menerus tanpa ada konsumsi akan menghancurkan sistem produksi itu sendiri. Meski demikian, Baudrillard menunjukkan pula bagaimana relasi antara kesadaran, hasrat-hasrat tak disadari (berciri libidinal/berasal dari libido), gagasan-gagasan strukturalisme yang melihat bahwa perilaku masyarakat itu pada dasarnya merupakan bentukan sistem kebahasaan dan elaborasi sisi ketidak sadaran melalui teknik-teknik iklan media komunikasi massa yang makin marak pada era 1970an di Eropa sebagai efek dari pembelajaran tentang propaganda di era perang dunia kedua.

Baudrillard meyakini bahwa masyarakat Eropa pada masanya telah berkembang menjadi masyarakat konsumeris. Mereka tidak hanya konsumtif begitu saja melainkan dibuat sedemikian rupa untuk menjadi konsumtif. Bagaimana ini terjadi? Baudrillard melihat bahwa refleksi kapitalisme terhadap

sistemnya sendiri nampaknya mengarahkan mereka akan kebutuhan akan konsumen dari hasil produksi yang selama ini selalu mereka tekankan. Karena teknologi memungkinkan produksi dilakukan secara massal dan terus-menerus, hasil produksi kemudian menjadi berlimpah-limpah sementara hasrat konsumsi konsumen cenderung tetap. Bila ini dibiarkan, produksi itu sendiri akan berhenti karena tanpa konsumsi, distribusi tidak mungkin dilakukan dan sistem produksi kapitalistik tidak akan terjadi. Maka, soal utamanya adalah bagaimana menciptakan konsumen-konsumen baru terhadap produk-produk mereka dan ini mungkin terjadi karena bisnis media komunikasi massa, khususnya televisi mulai populer dan iklan bisa menjadi strategi untuk merayu pemirsa agar jadi konsumen.

Meski demikian, bagi Baudrillard, rayuan ini bukan sekedar rayuan. Rayuan ini adalah “injeksi informasi” melalui berbagai sistem penandaan yang ditampilkan dalam media komunikasi massa dengan tujuan menciptakan tatanan kebenaran baru yang mengubah seluruh pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Sebagaimana gagasan Foucault, Baudrillard meyakini bahwa masyarakat Eropa dapat dikondisikan sedemikian rupa dengan manipulasi penandaan sehingga relasi antara objek yang tercerap pancaindera dengan makna yang diperoleh menjadi sedemikian logis dan nampak rasional (Schroader, 2005: 332). Ini misalnya nampak dalam relasi antara bunga mawar dan cinta yang ditampakkan dalam televisi. Pada dasarnya tidak ada hubungan langsung antara mawar dan cinta. Akan tetapi, ketika injeksi informasi dilakukan secara berulang-ulang, setiap konsumen akan mengasosiasikan mawar sebagai tanda cinta (sekurangnya ini berlaku dalam tayangan yang ditontonnya). Bila semua orang menonton televisi yang mengkonstruksi relasi antara mawar dan cinta sedemikian rupa, semua akan berpikir bahwa mawar pemberian seseorang bermakna cinta. Demikianlah, kalau kriteria kebenaran itu adalah universalitas, syarat-syarat itu dapat dipenuhi dengan proses pengkondisian terhadap masyarakat melalui berbagai proses modifikasi penandaan. Lama kelamaan, ketika pengkondisian melalui pengetahuan itu meluas, masyarakat meyakini bahwa apa yang ada dalam tanda yang mereka cerap dalam hidup sehari-hari bukan hanya representasi realitas melainkan realitas itu sendiri. Secara ekstrem, Baudrillard melihat bahwa masyarakat konsumen hidup dalam fantasi dan menyingkirkan realitas (Baudrillard, 1999: 35). Bagi Baudrillard, alih-alih, masyarakat kapitalis modern dalam memenuhi kebutuhan

hidup mereka agar sejahtera, mereka justru mengarahkan hidupnya menjadi masyarakat yang “kecanduan” konsumsi dan pelan tapi pasti mereka mengubah tatanan nilai yang berlaku dalam hidup sehari-hari mereka sebab, kebenaran ontologis ditolak dan kebenaran dikondisikan sebagai bentukan epistemologis sebagai hasil dari mekanisme penandaan sehari-hari (Baudrillard, 1999: 44).

Demikianlah, di masa ketika modal berkuasa sedemikian rupa, informasi dalam bentuk apapun tidak pernah berdiri dalam ruang netral yang bersih dari kepentingan. Informasi ini diperoleh tidak melulu lewat berbagai jalur yang rumit dan terkait dengan matriks yang tunggal namun berciri menyebar dan terawat dalam ruang-ruang lingkup hidup sehari-hari.

4. Catatan Kritis

Sebagai sebuah gagasan, pemikiran Foucault dan Baudrillard yang disuarakan pada era posstrukturalis (1970an) dan posmodernis (1980an) pada dasarnya adalah visi kenabian bagi zaman kita. Ketika produksi pengetahuan bisa dilakukan dengan sedemikian massif, wacana sebagai gugusan pernyataan kebenaran benar-benar merupakan komoditas yang bisa dipesan oleh siapapun pemilik modal. Di sini, semua teknik bermedia massa pada dasarnya adalah instrumen untuk “mencipta” apa yang benar dan pada gilirannya untuk memobilisasi massa untuk tujuan tertentu, mulai dari tujuan konsumtif hingga tujuan politik praktis. Inilah era pasca-kebenaran (*post-truth*).

Meski demikian, betulkan rasionalitas seseorang sesederhana itu? Inilah kritik penting bagi Foucault yang di kemudian hari juga mendorongnya untuk merefleksikan kembali gagasannya. Gagasan Foucault pada dasarnya memang menyisakan lubang pada konsepsi tentang manusia yang dibangunnya. Ini terutama terkait dengan penjelasan tentang kebebasan yang menjadi syarat dasar bagi gagasan tentang apa itu manusia. Bila manusia sedemikian rupa bisa dimobilisasi berdasarkan injeksi pengetahuan, tidak ada lagi gagasan tentang moralitas sebab andaian dasar bagi moralitas adalah kebebasan kehendak. Tanpa kehendak bebas, tindakan manusiawi kehilangan dimensi moralnya. Ia hanya menjadi mesin yang dikontrol oleh manipulator pengetahuan tanpa mampu mengatasinya. Meski sebagai gagasan pemikiran ini dapat dikritik, ini tidak berarti

bahwa gagasan Foucault bisa diabaikan begitu saja. Pemikiran ini membantu kita memberi kerangka dalam membaca tanda-tanda zaman di era digital ini.

Setali tiga uang, pengandaian Baudrillard tentang manusia juga perlu dikritisi. Pada hemat saya, kehidupan bersama yang telah dikooptasi oleh kapitalisme tidak seprediktif apa yang dikatakan Baudrillard. Sekalipun kapitalisme berciri total dalam mengkondisikan masyarakat, narasi-narasi tandingan tetap mampu hadir di era kapitalisme. Gagasan Baudrillard sendiri yang kritis dalam membaca zaman, toh merupakan salah satu narasi tandingan.

Kedua gagasan di atas pada dasarnya sangat membantu kita memahami dinamika demokrasi akhir-akhir ini. Dari dua kajian di atas, penulis melihat bahwa demokrasi sebagai model politik suatu negara pada dasarnya memiliki dua poros yang menentukan perjalanannya. Yang pertama adalah segala proses politik yang nampak sebagai tindakan politik praktis. Dalam konteks sistem politik demokrasi, kita melihatnya dalam masyarakat yang berbondong-bondong datang ke bilik suara yang diselenggarakan sedemikian rupa dalam pemilihan umum menurut waktu-waktu tertentu yang disepakati. Di sanalah seluruh dinamika politik warga negara mengerucut dalam pilihan pemimpin yang akan mewakili dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam hidup bersama. Meski demikian, pemilu dan segala yang secara kasat mata teridentifikasi sebagai tindakan politik praktis pada dasarnya bukan satu-satunya penentu arah politik hidup bersama. Inilah penentu politik yang kedua, yaitu segala hal “yang politis”. Yang politis meliputi seluruh ruang diskursus wacana warga negara dalam upayanya memperjuangkan arah hidup bersama agar sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasinya. Hal ini nampak dalam diskusi sehari-hari baik menjelang pemilihan umum demokratis maupun dalam perjalanan pemerintahan demokratis sesudah pemilu entah itu dalam pertemuan konkret antar warga maupun dalam ruang-ruang virtual. Proses Yang politis pada dasarnya terus-menerus terjadi dan dalam model pemerintahan demokratis, bagian ini seringkali lebih menentukan daripada apa yang terjadi dalam politik praktis. Dalam konteks globalisasi informasi digital, teknologi informasi yang pada mulanya berguna untuk memobilisasi masyarakat terkait dengan ekonomi, kini digunakan untuk kepentingan elektoral demi politik kekuasaan.

Sebagai catatan, penting disadari bahwa pergerakan politis melalui permainan wacana pada dasarnya tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saat revolusi industri 4.0 berjalan. Khususnya sejak pasca perang dunia kedua, perjalanan politik dunia kita pada dasarnya dijalankan berdasarkan permainan wacana. Kita dapat melihat ini dalam konteks pembentukan citra terhadap Amerika Serikat misalnya yang membangun gambaran diri sebagai negara superpower sedemikian rupa sehingga mereka menjadi ukuran bagi peradaban. Atau juga Eropa yang dicitrakan sebagai negara yang maju sehingga gaya hidup keEropa- eropaan mendapat nilai (termasuk nilai ekonomis) yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia sendiri, stigma terhadap beberapa etnis atau afiliasi politik terkait kelompok/golongan/partai tertentu pada dasarnya merupakan permainan wacana politis.

Persoalannya, dampak utama dari proses demokrasi yang mengandalkan pertarungan wacana ini adalah bahwa tujuan hidup bersama bisa dikorbankan demi pembangunan identitas politik yang seringkali dipaksakan. Dalam konteks inilah, kita dapat menilai bagaimana hoaks dan fake news berseliweran di sekitar kita melalui media komunikasi massa. Berita-berita semacam itu diproduksi sedemikian rupa untuk pembangunan citra sementara tujuan utama proses demokrasi diabaikan (Majalah Tempo 02-08, 2017: 28-4)

Dalam konteks politik Indonesia, hal ini sangat memungkinkan sebab sebagaimana dicatat oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia pada tahun 2017 saja mencapai 143,26 juta jiwa. Ini adalah 54,68 persen dari total penduduk Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah warga negara usia produktif yang memiliki hak pilih (kompas.com diakses pada 22 Februari 2018).

5. Membentuk Manusia Kritis di era Wacana Politis

Lalu bagaimana kita akan bersikap di era wacana politis ini? Catatan pertama penulis adalah bahwa dalam kondisi ini, tidak ada lagi ruang untuk apolitis. Sekalipun seseorang menyatakan bahwa ia tidak berafiliasi dengan kelompok politik praktis tertentu, sikapnya untuk netral itu sudah menunjukkan identitas yang akan tersemat sebagai posisi keberpihakan. Dan, apapun yang kita lakukan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain tidak ada satupun yang tidak

merupakan aktivitas politik. Dalam pergerakan tanpa ruang aposisi inilah identitas seseorang dibangun melalui citra-citra yang tersampaikan dalam keputusan-keputusannya. Ini tidak terjadi dalam ruang-ruang yang formal saja melainkan dalam ruang-ruang hidup sehari-hari. Di sini, hidup sehari-hari adalah ruang pembangunan identitas dan politik wacana adalah perang identitas kapanpun di manapun. Bila demikian, hidup politik di era demokrasi mudah terjebak pada permainan wacana dan pencitraan untuk membangun identitas kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi yang beradab di era wacana politis adalah soal upaya untuk mengatasi permainan identitas.

Dalam hal ini, penulis mengajukan gagasan Amartya Sen tentang Solidaritas untuk mengatasi rasionalitas ekonomi (Royda, hal 144). Solidaritas yang dimaksudkan di sini adalah keberanian untuk memilih sesuatu yang barangkali tidak sesuai dengan identitas yang mungkin disematkan pada seseorang oleh orang lain demi mewujudkan nilai-nilai tertentu. Di sini, seseorang rela menunda keinginannya dan memilih untuk menyatu dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya dan terlibat di dalamnya karena tindakan itu sesuai dengan tujuan hidupnya sekalipun hal itu membuatnya mengalami stigma tertentu yang tak diinginkan. Dengan keterlibatan semacam ini, seseorang mewujudkan komitmen pada nilai-nilai yang ingin diwujudkan.

Dalam konteks pertarungan wacana politik, pribadi yang solider dan berkomitmen ini pada dasarnya telah menentukan nilai-nilai yang ingin diperjuangkannya dalam hidup bersama. Ia mampu mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang ingin diperjuangkannya itu secara rasional dan karenanya ia siap berdialog. Orang semacam ini tidak mudah diombang-ambingkan berbagai pengetahuan yang terinjeksikan padanya dalam hidup sehari-hari karena dia memiliki filter untuk mengkondisikan dirinya.

Bagaimana mungkin pribadi semacam ini terwujud ketika kondisi hidup bersama sudah penuh dengan pertarungan politik? Di sinilah kritik terhadap gagasan Foucault dan Baudrillard bisa ditempatkan. Di tengah pertarungan politik melalui permainan wacana, kehendak pribadi seseorang tetap memiliki ruang untuk menciptakan narasi alternatif. Untuk itu, pribadi yang solider dan berkomitmen bukanlah hasil sekali jadi. Pribadi semacam ini harus mampu mengkondisikan dirinya dan didukung oleh kondisi struktural yang membantunya

untuk bertumbuh dalam solidaritas dan komitmen. Dalam konteks hidup bernegara, penulis melihat beberapa bidang berikut perlu mendapat perhatian dalam rangka pembentukan pribadi tersebut

datang ke bilik suara yang diselenggarakan sedemikian rupa dalam pemilihan umum menurut waktu-waktu tertentu yang disepakati. Di sanalah seluruh dinamika politik warga negara mengerucut dalam pilihan pemimpin yang akan mewakili dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam hidup bersama. Meski demikian, pemilu dan segala yang secara kasat mata teridentifikasi sebagai tindakan politik praktis pada dasarnya bukan satu-satunya penentu arah politik hidup bersama. Inilah penentu politik yang kedua, yaitu segala hal “yang politis”. Yang politis meliputi seluruh ruang diskursus wacana warga negara dalam upayanya memperjuangkan arah hidup bersama agar sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasinya. Hal ini nampak dalam diskusi sehari-hari baik menjelang pemilihan umum demokratis maupun dalam perjalanan pemerintahan demokratis sesudah pemilu entah itu dalam perjumpaan konkret antar warga maupun dalam ruang-ruang virtual. Proses Yang politis pada dasarnya terus-menerus terjadi dan dalam model pemerintahan demokratis, bagian ini seringkali lebih menentukan daripada apa yang terjadi dalam politik praktis. Dalam konteks globalisasi informasi digital, teknologi informasi yang pada mulanya berguna untuk memobilisasi masyarakat terkait dengan ekonomi, kini digunakan untuk kepentingan elektoral demi politik kekuasaan (Marchart, 2007: 1-4). Sebagai catatan, penting disadari bahwa pergerakan politis melalui permainan wacana pada dasarnya tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saat revolusi industri 4.0 berjalan. Khususnya sejak pasca perang dunia kedua, perjalanan politik dunia kita pada dasarnya dijalankan berdasarkan permainan wacana. Kita dapat melihat ini dalam konteks pembentukan citra terhadap Amerika Serikat misalnya yang membangun gambaran diri sebagai negara superpower sedemikian rupa sehingga mereka menjadi ukuran bagi peradaban. Atau juga Eropa yang dicitrakan sebagai negara yang maju sehingga gaya hidup keEropa- eropaan mendapat nilai (termasuk nilai ekonomis) yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia sendiri, stigma terhadap beberapa etnis atau afiliasi politik terkait kelompok/golongan/party tertentu pada dasarnya merupakan

permainan wacana politis. Persoalannya, dampak utama dari proses demokrasi yang mengandalkan pertarungan wacana ini adalah bahwa tujuan hidup bersama bisa dikorbankan.

demi pembangunan identitas politik yang seringkali dipaksakan. Dalam konteks inilah, kita dapat menilai bagaimana hoaks dan fake news berseliweran di sekitar kita melalui media komunikasi massa. Berita-berita semacam itu diproduksi sedemikian rupa untuk pembangunan citra sementara tujuan utama proses demokrasi diabaikan (Majalah Tempo 2-8, 2017: 28-40). Dalam konteks politik Indonesia, hal ini sangat memungkinkan sebab sebagaimana dicatat oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia pada tahun 2017 saja mencapai 143,26 juta jiwa. Ini adalah 54,68 persen dari total penduduk Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah warga negara usia produktif yang memiliki hak pilih (kompas.com diakses pada 22 Februari 2018

6. Ruang Publik Demokratis yang Egaliter

Demokrasi kontemporer pada dasarnya mengandalkan partisipasi lebih dari seluruh masyarakat. Ia tidak cukup didasarkan pada tingkah laku para wakil rakyat yang atas nama mewakili aspirasi masyarakat justru sering terjebak pada upaya menjadikan rakyat melulu sebagai objek demokrasi. Untuk itu, penting bagi suatu masyarakat untuk membentuk kondisi agar setiap orang sebagai individu berani berpikir sendiri. Mereka adalah pribadi-pribadi yang kritis dan mampu memilah-milah mana yang rasional dan mana yang sentimental, mana yang ikut-ikutan dan mana yang diputuskannya sendiri. Di sinilah, ruang-ruang diskusi diperlukan agar satu sama lain bisa saling mengkritisi dan mempertajam gagasan. Ruang ini bukan selalu berarti tempat tapi bisa jadi merupakan suasana di mana siapapun bisa bersikap kritis tentang apapun. Secara jauh lebih konkret, pendidikan perlu menciptakan situasi bagi peserta didiknya untuk berani mencurigai dan mempertanyakan sesuatu, melatih mereka untuk menarasikan gagasan mereka secara rasional dan mempertanggungjawabkannya. Harapannya, setiap orang bisa memiliki komitmen yang lahir dari solidaritas atas nilai-nilai yang dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional dan dengan demikian tidak mudah terserap ke dalam massa dan kerumunan yang sekedar ikut-ikutan. Di sini, pribadi yang kritis akan menemukan komunitas kritis. Harapannya, hidup bersama

dipenuhi oleh orang-orang yang memperjuangkan kepentingannya yang rasional dan siap beradu argumentasi secara masuk akal dengan orang lain dan dengan demikian, demokrasi kita bisa membentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan diskusi rasional (Sen, 2009: 321-327). Kondisi ini perlu didukung oleh kesediaan para pejabat publik untuk transparan dan siap mempertanggungjawabkan semua keputusan terkait kebijakan publiknya. Soal ini, teknologi informasi di era industri 4.0 pada dasarnya akan sangat membantu menyediakan akses.

Kesimpulan

Hoaks dan fake news dalam konteks demokrasi ini pada dasarnya adalah bagian dari propaganda melalui media komunikasi massa dalam bidang politik. Arus besarnya adalah pergeseran dan percepatan distribusi informasi karena media komunikasi massa. Berhadapan dengan pertarungan wacana yang tidak memungkinkan sikap apolitis, negara-bangsa pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membentuk dan merawat identitas yang akan pegangan bagi warga negara yang harus ikut berlaga dalam pertarungan wacana politis. Identitas ini adalah batu pijakan untuk berselancar di era pertarungan arus wacana. Identitas ini menjadi pedoman nilai-nilai mana yang akan diacu dan bentuk manusia semacam apa yang nanti akan diwujudkan. Dalam konteks praktek pertarungan wacana, perawatan identitas semacam ini adalah wujud keterlibatan negara dalam membentuk narasi kebangsaannya demi menjaga kelangsungan hidup bersama sebagai bangsa. Peran aktif negara ini pada dasarnya harus dilakukan bukan hanya pada event-event tertentu (yang menguntungkan kelompok tertentu secara politis) melainkan dalam bentuk kehadiran negara dalam edukasi, budaya dan secara konkret dalam persoalan-persoalan sehari-hari warganya. Di sini, terlebih dahulu diperlukan seorang pemimpin yang memegang teguh narasi solidaritas dan komitmen mengatasi golongannya sendiri. Dalam rangka menjaga martabat demokrasi, pembentukan identitas ini perlu disampaikan dengan cara-cara yang tidak merusak partisipasi demokratis warga negara.

Bersamaan dengan perawatan identitas kebangsaan, komunitas kritis perlu disokong oleh negara yang menyelenggarakan edukasi tentang literasi media massa yang tidak melulu fokus pada hal-hal teknis terkait bagaimana

menghasilkan wacana di media komunikasi massa kontemporer melainkan soal kesadaran bahwa media komunikasi massa dapat melakukan framing, propaganda terhadap para konsumennya. Di sini, literasi harus mampu menunjukkan bahwa media komunikasi massa tidak pernah netral sehingga sesuai dengan visi dan harapan mereka, konsumen tetap dapat memilih mana yang kira-kira akan membawa pada tujuannya dan mana yang tidak. Demikian pula, konsumen media komunikasi massa yang memiliki visi dan identitas jelas ini menjadi tidak begitu saja mengumbar sentimen pribadinya dengan percaya pada kisah-kisah bombastis yang berbau hoaks dan *fake news*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baudrillard, Jean, *The Consumer society, Myths & Structures*, London: Sage Publication, 1999
- Budi Hardiman, F., *Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Foucault, Michel, *Discipline and Punish*, New York> Penguin Books, 1979
- Marchart, Oliver, *Post-Foundational Political Thought*, Edinburg: Edinburg University Press, 2007
- Schroeder, William S., *Continental Philosophy, A Critical Approach*, Malden: Blackwell Publishing, 2005
- Sen, Amartya, *The Idea of Justice*, Cambridge: Belknap Press, 2009
- Steger, Manfred B., Ravi K. Roy, *Neoliberalism, a very short introduction*, Oxford: Oxford University Press, 201
- MacLeod, Alistair M., 'Free Market and Democracy: Clashing Ideals in a Globalizing World', dalam *Journal of Social Philosophy, Vol 37 No. 1 Spring 2006*, New York: Blackwell Publishing, 2006, hal. 139-162
- Roida, Herlina Yoka, "Moral dan Modal: *Bonum Commune* dalam Gagasan Pemikir Pasar Bebas, dalam Simon Untara dan Datu Hendrawan, *Bonum Commune dalam Filsafat Barat*, Surabaya: PT Kanisius dan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, hal. 143-160
- Wabah Hoax*, Majalah Tempo 2-8 Januari 2017
- Kompas.com
- Wearesocial.com
- Apjii.or.id